

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

A. Ancaman Krisis Pangan

Di Provinsi Jawa Timur, ancaman krisis pangan cenderung makin nyata ketika dikaitkan dengan persoalan kependudukan. Seperti diketahui, bahwa pertumbuhan penduduk cenderung mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Hal ini berarti krisis pangan akan benar-benar terjadi manakala tidak ada upaya-upaya yang serius untuk memperbaiki struktur produksi pangan.

Perkembangan industri yang terkonsentrasi di wilayah urban dan kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana kehidupan, menyebabkan lahan produktif semakin berkurang. Disisi lain permasalahan yang harus dihadapi petani adalah kenaikan biaya produksi dan perolehan margin keuntungan yang makin tipis, sehingga nilai tukar petani menjadi rendah, hal ini antara lain yang menyebabkan gairah petani bercocok-tanam mengalami kelesuan, dan pada akhirnya profesi petani semakin tidak menarik.

Secara garis besar, beberapa kelemahan sektor pertanian di Jawa Timur dan ancaman krisis pangan bukan tidak mungkin akan terjadi di Jawa Timur, antara lain karena: (1) terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri, permukiman dan pusat perkantoran, (2) rendahnya nilai tukar produk pertanian dan *linkages* antara sektor pertanian dan industri yang cenderung bersifat asimetris, (3) lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian yang menyebabkan pemasaran menjadi inefisien dan merugikan petani, (4) kurang berkembangnya aspek kelembagaan yang mendukung pengembangan sektor pertanian, (5) mutu produk pertanian belum terstandarisasi dan kemasan produk yang tidak *market friendly*, (6) kualitas bibit, benih dan teknologi pertanian yang masih rendah serta penerapan teknologi yang masih terbatas, dan (7) kurangnya sarana dan prasarana wilayah pendukung pengembangan sistem agrobisnis (8) ketersediaan pupuk anorganik dan kecenderungan pemakaian pupuk

anorganik

anorganik secara berlebihan serta masih rendahnya pemakaian pupuk organik.

Berkaitan dengan hal tersebut, kewaspadaan pangan dan gizi merupakan upaya yang bersifat preventif dan berkesinambungan, meliputi kegiatan yang mewaspadaai timbulnya kerawanan pangan dan gizi, kelaparan, keamanan dan mutu pangan, serta merumuskan langkah–langkah antisipasi dan penanggulangannya.

B. Krisis Energi

Sebagai daerah yang berkembang pesat, pertumbuhan industri dan penduduk di Provinsi Jawa Timur yang cepat menuntut adanya ketersediaan energi dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu, energi minyak bumi dan gas alam yang tersedia jumlahnya semakin terbatas dan jenis energi tersebut sifatnya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Pengalaman selama ini telah banyak membuktikan bahwa keterbatasan ketersediaan energi, bukan saja menyebabkan harga energi di pasaran menjadi makin mahal, tetapi juga menyebabkan efek domino terhadap peningkatan harga kebutuhan masyarakat yang lain.

Salah satu dampak yang selalu terjadi akibat adanya krisis energi adalah harga satuan energi semakin tidak terkendali dan menyebabkan kekurangan energi di berbagai negara karena ketidakmampuannya untuk membeli atau memproduksi energi. Ancaman krisis energi juga menyebabkan terbukanya peluang konflik sosial sebagai akibat meningkatnya jumlah orang miskin dan bertambahnya pengangguran.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi krisis energi antara lain melalui penggunaan energi alternatif dan produk bio yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini ternyata melahirkan masalah baru, peningkatan permintaan jagung untuk kepentingan manusia, hewan dan energi menyebabkan harga komoditi tersebut menjadi mahal dan berdampak, baik secara sosial maupun ekonomi di berbagai negara.

Untuk mengatasi ancaman krisis energi, perlu diupayakan pencarian energi alternatif secara terus menerus terkait dengan energi yang ramah

lingkungan

lingkungan, seperti energi matahari, air dan angin yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia dan Provinsi Jawa Timur pada khususnya.

C. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara.

Di era perekonomian global yang makin kompetitif, sejumlah ciri yang menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan (*preference*) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level dari tingkat global hingga lokal. Secara umum, lima karakteristik yang menandai terjadinya globalisasi adalah: Pertama, pertumbuhan transaksi keuangan internasional yang cepat. Kedua, pertumbuhan perdagangan yang cepat, terutama di antara perusahaan-perusahaan transnasional. Ketiga, gelombang investasi asing langsung (*foreign direct investment*) yang mendapat dukungan luas dari kalangan perusahaan transnasional. Keempat, timbulnya pasar global. Kelima, penyebaran teknologi dan berbagai pemikiran sebagai akibat ekspansi sistem transportasi dan komunikasi yang cepat dan merambah ke seluruh penjuru dunia.

Di Indonesia

Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, globalisasi adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang – barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan *non-tarif barriers* seperti standarisasi produk melalui ISO, *Eco Labelling*, HACCP dan lain-lain, yang dapat mengganggu kinerja perdagangan luar negeri kita.

Dalam konteks relasi yang tidak seimbang antara negara maju dan negara sedang berkembang, bagaimana pun sulit diharapkan efek globalisasi akan dapat netral dan apalagi menguntungkan negara sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Perkembangan ekonomi global dan upaya yang dilakukan lembaga-lembaga besar dalam proses globalisasi telah menjatuhkan negara-negara yang sedang kesulitan yang seharusnya mereka bantu, karena di balik itu pertimbangan yang dipakai para perumus kebijakan global ternyata lebih banyak pertimbangan politis daripada pertimbangan yang benar-benar obyektif.

D. Kemiskinan, Kesenjangan, Pengangguran dan Kualitas SDM

Di Provinsi Jawa Timur, tantangan di bidang sosial adalah adanya kesenjangan sosial, dan kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing di era global yang makin kompetitif. Kesenjangan sosial, dalam banyak hal akan melahirkan proses eksploitasi dan marginalisasi masyarakat miskin karena posisi mereka yang rentan dan tersubordinasi. Sedangkan kemiskinan, di sisi yang lain akan menyebabkan terjadinya percepatan dan pendalaman kemiskinan, yang ujung-ujungnya akan memperlebar jurang perbedaan antar-kelas, antar-daerah, dan antar yang dikuasai dan yang menguasai, serta melahirkan efek domino lain berupa peningkatan jumlah pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor riil, terpuruknya kualitas sumber daya manusia yang ada, rendahnya akses masyarakat ke berbagai layanan

publik, dan bahkan hilangnya kesempatan si miskin untuk meningkatkan posisi tawar dan melakukan mobilitas vertikal untuk memperbaiki taraf kehidupannya.

Di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur, persoalan kemiskinan seringkali makin sulit teratasi ketika kesenjangan sosial yang terjadi tak kunjung teratasi. Faktor penyebab kemiskinan seolah tak kunjung tertangani bukan sekadar karena dan bersumber pada kelemahan dari si miskin itu sendiri, tetapi lebih karena faktor-faktor struktural di luar kemampuan si miskin yang cenderung makin *rigid* dan tidak ramah kepada masyarakat miskin.

Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, dan imbas terjadinya krisis global, bukan saja menyebabkan terjadinya gelombang PHK, berkurangnya kesempatan kerja, dan *kolapsnya* sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, tetapi juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan. Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan, serta keahlian yang profesional, seringkali menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai (*mismatch*) dengan kebutuhan pasar kerja.

Untuk menangani kemiskinan dan meningkatkan posisi tawar (*bargaining*) masyarakat miskin terhadap semua bentuk eksploitasi dan superordinasi, yang dibutuhkan adalah kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang memihak kepada masyarakat miskin dan pengangguran. Dalam hal ini kemudahan ekonomi, adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan persyaratan yang menyulitkan. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif.

E. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global

Pemanasan global dan perubahan iklim tengah terjadi dan diperkirakan akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Banyaknya kejadian bencana seperti banjir, longsor, erosi, badai tropis, dan kekeringan merupakan dampak nyata dari perubahan iklim dan pemanasan global. Agenda adaptasi terhadap dampak perubahan iklim diperlukan untuk menciptakan sistem pembangunan yang berdaya tahan (*reliance*) terhadap goncangan variabilitas iklim saat ini (anomali iklim) danantisipasi dampak perubahan iklim di masa depan. Fokus adaptasi ini kiranya perlu ditujukan pada area-area yang rentan terhadap perubahan iklim seperti : sumberdaya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan permukiman, kesehatan, dan kehutanan.

Arah Kebijakan pembangunan yang berdaya tahan terhadap resiko perubahan iklim, pada masing-masing fokus area perlu mempertimbangkan agenda perubahan iklim terkait tujuan pembangunan nasional dan daerah serta diselaraskan tujuan pembangunan millenium (*millenium development goals/MDG's*). Terdapat beberapa isu mendasar yang layak menjadi perhatian pada setiap fokus area, masing-masing berkaitan dengan usaha penanggulangan kemiskinan; pembangunan ekonomi dan sosial; investasi; dan perencanaan tata ruang. Sebagaimana banyak terjadi pada tahun-tahun terakhir, berbagai implikasi dari perubahan iklim telah menjadikan derita para miskin menjadi berlipat kali: para nelayan tidak bisa melaut karena gelombang besar, para petani miskin di perdesaan lahan-lahan pertaniannya terancam banjir kala musim penghujan dan terancam kekeringan kala musim kemarau.

Untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tengah dan diperkirakan akan terus terjadi ini, upaya penegakan hukum yang konsisten dan tegas, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), persiapan, dan rekayasa sosial, serta sosialisasi dan pendidikan yang intensif, menjadi persyaratan penting yang mutlak dipenuhi melalui kebijakan yang lebih komprehensif.